KEMENTERIAN KEUANGAN RI					
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK					

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

KEMENTERIAN KEUANGAN RI				н.4 Х	Final	
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	H.2 X Pembetulan Ke-	0 H.3 Pembatala	n	н.5	Tidak Final	
A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG						
A.1 NPWP : 88 561 227 5 722 000						
A.2 NIK :						
A.3 Nama : TITIK FATMAWATI						
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG	HIMI ALI DENGLIACII AN		TARIF LEBIH		I	
MASA PAJAK (mm-yyyyy) KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1 B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
1 21-402-01	7.241.400	7.241.400	0	5	362.070	
Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi: Nomor Dokumen Faktur Pajak Nama Dokumen PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
Nomor:						
C.1 NPWP Instansi Pemerintah : C.2 Nama Instansi Pemerintah :	9 5 3 3 5 0 1 6 2 7 2 2 0 0 0 RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR					
C.3 ID Subunit Organisasi : C.4 Tanggal .						
	2 6 dd 0 1 mm	2 0 2 2 yyyy				
C.6 Pernyataan Wajib Pajak :		ahwa bukti Pemotongan/Pemungut	tan Unifikasi telah sa	ya isi dengan	benar dan telah saya	
Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.						

GUQ6IDU7